



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DENGAN
PERHIMPUNAN INDONESIA DAMAI (PID), LESPERSSI, DAN LEMBAGA STUDI
PERTAHANAN UNIVERSITAS INDONESIA
TANGGAL 9 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2008 . 2009.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 11 (sebelas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Hari/tanggal	: Senin, 9 November 2009
P u k u l	: 14.00 WIB . 16.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/tanggapan atas penyusunan Program Legislasi Nasional dari PID, LESPERSSI, dan LSP Universitas Indonesia.
Ketua Rapat	: Dra. Ida Fauziah.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 19 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dra. Ida Fauziah.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Nara Sumber untuk menyampaikan masukan/tanggapan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program
Legislasi Nasional Tahun 2010 mendapat masukan dari Narasumber

sebagai berikut:

1. Perhimpunan Indonesia Damai (PID)
 - a. Perhimpunan Indonesia Damai sangat konsen terhadap perdamaian di Indonesia, sehingga diperlukan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial karena Indonesia potensi konfliknya cukup besar.
 - b. Penanganan konflik social yang sudah dilakukan secara parsial selama ini terhadap konflik yang terjadi tidak dapat membawa perdamaian secara tulus dan sering melalui yudisial formal dan perlu ada payung hukum yang dapat mendeteksi sebelum terjadinya peristiwa, saat terjadi, dan pasca terjadi konflik.
 - c. Dalam konflik-konflik sosial penanganannya sangat berbeda dengan bencana alam.
 - d. Terkait dengan penyiapan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial sudah dilakukan audiensi dengan Pemerintah dan telah bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan.
2. Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (LESPERSSI)
 - a. Mengusulkan RUU tentang Wilayah Negara atau Wilayah Perbatasan Negara, karena perbatasan negara dan wilayah perbatasan negara sering menjadi kejahatan lintas negara walau hanya sekedar menyelundupkan bahan makanan sampai kejahatan terorganisir, misalnya penyelundupan manusia dan obat-obatan terlarang.
 - b. Perlu segera dirumuskan RUU yang dapat mengakhiri tumpang tindih penagakkan hokum di laut, misalnya terkait penyelundupan manusia di kapal, penangkapan ikan illegal oleh kapal asing, kadang-kadang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan dilakukan oleh Polairud.
 - c. Perlu dibentuk Badan Pengelola Wilayah Perbatasan Negara tetapi harus hati-hati dengan pengaturan dalam Undang-Undang tentang TNI, karena TNI satu-satunya institusi yang bertanggungjawab terhadap perbatasan negara.
 - d. Tidak adanya Badan Pengelola Wilayah Perbatasan kadang-kadang mempersulit dalam melakukan kerjasama dengan negara lain, karena negara lain akan sulit mencari parnert kerja dengan mitra di Indonesia.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh Narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Jakarta, 9 November 2009

**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

DRA. HJ. IDA FAUZIAH
A - 168